



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
GEDUNG N LANTAI I DAN II, GEDUNG KEUANGAN NEGARA JALAN ASIA AFRIKA NO. 114 BANDUNG, JAWA BARAT
40261; TELEPON: (022) 4216161; FAKSIMILE: (022) 4263131; SUREL: KPKNL.BNDG@KEMENKEU.GO.ID

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**
KPKNL BANDUNG TAHUN
2025

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Secara struktur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung berada pada level PPID Tingkat III yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II.

Sesuai dengan PMK nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN terdiri dari Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung yang ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Bandung memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* KPKNL Bandung dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung>.

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KPKNL Bandung memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Satuan Kerja dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Bandung juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/KMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik memiliki jenjang sebagai berikut:

1. PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas DJKN
2. PPID Tingkat II : Kanwil DJKN dan BLU LMAN
3. PPID Tingkat III : KPKNL

Guna mendukung layanan informasi melalui KPKNL Bandung terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Bandung melalui:

1. Surat;
2. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat kpknlbandung@kemenkeu.go.id;
3. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik di KPKNL Bandung selaku perangkat PPID Tingkat III seluruh pejabat dan pegawai yang ada di lingkungan Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Bandung.

SDM tersebut bertugas untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah permintaan informasi publik KPKNL Bandung pada tahun 2024 adalah **1 (satu) permintaan informasi publik** dan sengketa informasi publik kepada KPKNL Bandung adalah **tidak ada sengketa informasi publik**. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	40 (Empat puluh)
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Rata-rata waktu penyelesaian selama 7 hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	28 (Dua puluh delapan)
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	12 (Dua belas) dikarenakan Sampai dengan jangka waktu 3 hari kerja sejak disampaikan Surat Ketidaklengkapan Informasi Publik, KPKNL Bandung belum mendapatkan Jawaban atas permohonan kelengkapan, sehingga diterbitkan

		Surat PPID Tidak Ditindaklanjuti dan termasuk Informasi yang dikecualikan.
5	Kedudukan hukum Pemohon	Kota Bandung
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Melalui surat

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Eksternal

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi public pada eksternal.

Kendala Internal

Keterbatasan jumlah pegawai pada seksi Hukum dan Informasi dan jumlah frekuensi pelaksanaan sidang yang banyak, berdampak pada berkurangnya ketersediaan pegawai yang dapat lebih cepat menindaklanjuti permohonan informasi.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi public adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Bandung melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui whatsapp, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bandung.
6. Mengingat pelaksanaan mutasi pegawai di DJKN, diharapkan agar Kantor Pusat DJKN melaksanakan sosialisasi/pelatihan terkait PPID setelah ada Surat Keputusan Mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang utuh terkait Penanganan Permintaan Informasi Publik.

17	KPKNL Bandung	REG-17/PPID.KN/2025	03/07/2025	Irma Rismiani	Perorangan	Berkas Pelaksanaan Lelang	Cimahi	Surat	S-5778/KNL.0801/2025	04/07/2025			✓	✓		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	KPKNL Bandung	REG-18/PPID.KN/2025	11/07/2025	Kantor Firma Hukum Gerbang Keadilan	Badan Hukum Indonesia	Berkas Pelaksanaan Lelang	Kab. Bandung Barat	Surat	S-6162/KNL.0801/2025	17/07/2025			✓	✓		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	KPKNL Bandung	REG-19/PPID.KN.08.01/2024	22/07/2025	Wilson Wijaya Iskandar	Perorangan	Berkas Pelaksanaan Lelang	Kota Bandung	Surat	S-6432/KNL.0801/2025	28/07/2025			✓			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	KPKNL Bandung	REG-20/PPID.KN.08.01/2025	25/07/2025	Maulana Sanjaya	Perorangan	Pemenang Lelang	Kota Bandung	Surat	S-6439/KNL.0801/2025	28/07/2025	✓					3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	KPKNL Bandung	REG-21/PPID.KN.08.01/2025	14/07/2025	Miriam Dani	Perorangan	Berkas Pelaksanaan Lelang	Kota Bandung	Surat	S-7097/KNL.0801/2025	21/08/2025			✓			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	KPKNL Bandung	REG-22/PPID.KN.08.01/2025	14/08/2025	Kantor Hukum LBH-BALINKRAS	Badan Hukum Indonesia	Pemenang Lelang	Kabupaten Bandung	Surat	S-7107/KNL.0801/2025	21/08/2025	✓					5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	KPKNL Bandung	REG-23/PPID.KN.08.01/2025	15/08/2025	Saepul Eppendi	Perorangan	Permintaan Informasi Harga Lelang atas Eksekusi Tanah dan Bangunan Debituran Saepul Eppendi	Kabupaten Bandung	Surat	S-7150/KNL.0801/2025	25/08/2025	✓					6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	KPKNL Bandung	REG-24/PPID.KN.08.01/2025	19/08/2025	Azis Mustafa Kamal	Perorangan	Pemenang Lelang	Kota Bandung	Surat	S-7111/KNL.0801/2025	22/08/2025			✓			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	KPKNL Bandung	REG-25/PPID.KN.08.01/2025	08/09/2025	Suherman	Perorangan	Pemenang Lelang	Kota Bandung	Surat	S-7473/KNL.0801/2025	11/09/2025			✓			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	KPKNL Bandung	REG-26/PPID.KN.08.01/2025	15/09/2025	Kantor Hukum "Deded Gunasyah, S.H. dan Rekan"	Badan Hukum Indonesia	Hasil Lelang	Kota Bandung	Surat	S-7682/KNL.0801/2025	19/09/2025			✓			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ditindaklanjuti karena dokumen persyaratan tidak lengkap

27	KPKNL Bandung	REG-27/PPID.KN.08.01/2025	29/09/2025	Alfian Teddy Putra, S.H.	Perorangan	Hasil Lelang	Kota Bandung	Surat	S-7929/KNL.0801/2025	06/10/2025		✓					6	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	KPKNL Bandung	REG-28/PPID.KN.08.01/2025	09/10/2025	Itho Suyono	Perorangan	Berkas Pelaksanaan Lelang	Kota Bandung	Surat	S-8275/KNL.0801/2025	16/10/2025		✓					5	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	KPKNL Bandung	REG-29/PPID.KN.08.01/2025	13/10/2025	Kantor Hukum Barokah SH MH dan Rekan	Badan Hukum Indonesia	Berkas Pelaksanaan Lelang	Kota Bandung	Surat	S-8360/KNL.0801/2025	22/10/2025		✓					6	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	KPKNL Bandung	REG-30/PPID.KN.08.01/2025	15/10/2025	Kantor hukum Hibar Dirachmat, S.H. dan Rekan	Badan Hukum Indonesia	Risalah Lelang	Sukabumi	Surat	S-8359/KNL.0801/2025	22/10/2025		✓					5	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	KPKNL Bandung	REG-31/PPID.KN.08.01/2025	21/10/2025	Rozal Effendi	Perorangan	Pemenang Lelang	Kabupaten Bandung	Surat	S-8411/KNL.0801/2025	23/10/2025		✓					2	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	KPKNL Bandung	REG-32/PPID.KN.08.01/2025	27/10/2025	Wawan Karyawan	Perorangan	Pemenang Lelang	Kabupaten Bandung	Surat	S-8631/KNL.0801/2025	05/11/2025		✓					6	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	KPKNL Bandung	REG-33/PPID.KN.08.01/2025	04/11/2025	Suherman	Perorangan	Salinan Risalah Lelang dan Pemenang Lelang	Kota Bandung	Surat	S-8852/KNL.0801/2025	13/11/2025		✓					8	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	KPKNL Bandung	REG-34/PPID.KN.08.01/2025	10/11/2025	Suherman	Perorangan	Pemenang Lelang	Kota Bandung	Surat	S-9014/KNL.0801/2025	21/11/2025		✓					9	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	KPKNL Bandung	REG-35/PPID.KN.08.01/2025	18/11/2025	Marzuki	Perorangan	Harga Lelang	Bandung	Surat	S-9111/KNL.0801/2025	26/11/2025		✓					5	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	KPKNL Bandung	REG-36/PPID.KN.08.01/2026	19/11/2025	Advokat/Konsultan Hukum A.Saepul Ulum S. Ag., S.H. & Associates	Badan Hukum Indonesia	Salinan Risalah Lelang dan Pemenang Lelang	Jakarta Timur	Surat	S-9242/KNL.0801/2025	02/12/2025			✓				3	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ditindaklanjuti karena dokumen persyaratan tidak lengkap

37	KPKNL Bandung	REG-37/PPID.KN.08.01/2025	21/11/2025	KANTOR HUKUM FIRDAUS & REKAN	Badan Hukum Indonesia	Hasil Lelang	Kota Pekanbaru	Surat	S-9147/KNL.0801/2025	27/11/2025	✓						4	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KPKNL Bandung	REG-38/PPID.KN.08.01/2025	01/12/2025	Haslinda	Perorangan	Hasil Lelang	Panyileukan	Surat	S-9465/KNL.0801/2025	24/12/2025	✓						16	-	-	-	-	-	-	-	-
39	KPKNL Bandung	REG-39/PPID.KN.08.01/2025	01/12/2025	Nicolaus Supriadi	Perorangan	Hasil Lelang	Jakarta Timur	Surat	S-9263/KNL.0801/2025	03/12/2025	✓						3	-	-	-	-	-	-	-	-
40	KPKNL Bandung	REG-40/PPID.KN.08.01/2025	11/12/2025	Laskar Merah Putih Kabupaten Sumedang	Kelompok Orang	Risalah Lelang	Kabupaten Sumedang	Surat	S-9467/KNL.0801/2025	24/12/2025		✓					8	-	-	-	-	-	-	-	-

Bandung, 13 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Karman

